

**ANALISIS PROSEDUR AUDIT ASET TETAP DAN OPINI ATAS
LAPORAN KEUANGAN AUDITED SERTA DAMPAK PADA
RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN
(STUDY KASUS PADA SEBUAH BUMD DI PROVINSI PAPUA)**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA: JANTJE LAGU

NIM: 126222106

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA

TAHUN 2023

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PROSEDUR AUDIT ASET TETAP DAN OPINI ATAS
LAPORAN KEUANGAN AUDITED SERTA DAMPAK PADA
RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN
(STUDY KASUS PADA SEBUAH BUMD DI PROVINSI PAPUA)**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA: JANTJE LAGU

NIM: 126222106

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI AKUNTAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TAHUN 2023**

**ANALISIS PROSEDUR AUDIT ASET TETAP DAN OPINI ATAS
LAPORAN KEUANGAN AUDITED SERTA DAMPAK PADA
RESTRUKTURISASii PERUSAHAAN
(STUDY KASUS PADA SEBUAH BUMD PROVINSI PAPUA).**

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Disusun Oleh

JANTJE LAGU

NIM 126222106

Disetujui Oleh: Pembimbing

Fery Adang,S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA

Disetujui Oleh: Ketua Program Studi PPA

Dr.Jamaludin Ishak, M.Si.,Akt.,CPI.,CA.,CPA.,Asean CPA

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2023

A BSTRAK

Pengendalian internal Aset tetap khususnya aset peninggalan PT Irian Bhakti Papua berupa tanah dan bangunan hingga saat ini memiliki kelemahan yang signifikan; 22 unit dikuasai pihak III dan 70 unit ex pegawai dan pegawai, 2 unit telah dilepaskan melalui Surat Keputusan Gubernur, Perusahaan hanya menggunakan 35 unit dan 21 unit tidak memiliki bukti kepemilikan sah. Kondisi diatas tidak sesuai PSAK 16 dan adanya penyimpangan opini sesuai standar professional akuntan publik atas laporan keuangan audited periode yang berakhir 30 september 2022 selayaknya “ Opini Modifikasian tidak memberikan pendapat” dan penekanan suatu hal terkait proses likwidasi sesuai Perda 4 tahun 2022 dan sebaliknya” opini wajar tanpa modifikasi” kurang tepat dengan merujuk pada kecukupan dan ketepatan bukti. Kondisi diatas berdampak dalam pertimbangan manajemen dalam restrukturisasi perubahan badan hukum sehingga keputusan Gubernur sebagai Pemegang Saham termaksud kebijakan revaluasi perlu ditindaklanjuti segera untuk meningkatkan nilai Perusahaan.

Kata kunci : Prosedur Audit Aset Tetap; Opini, PSAK, SPAP. <Restrukturisasi

ABSTRACT

.Internal control of fixed assets, expecially assets left by PT Irian Bhakti Papua in the form of land and buildings, have significant inherent weakness; 22 units controlled by party III, and 70 units of ex-employees and employees, 2 units have been completed through the Governor’s Decree, the company only uses 35 units and 21 units have not proof of legal ownership. The conditions are not in accordance with PSAK 16 and there is a deviation of opinion according to professional standards of public accountants on audited financial statements for the period ending September 30, 2022, as well as possible “ Opinion Modification does not give an opinion” and the emphasis on matters related to the liquidation process according to Perda 4 of 2022 and vice versa” fair opinion without modification” is not appropriate with referring to the adequacy and accuracy of evidence. The above condition have an impact on management considerations in restructuring changes in legal entities so the the Governor’s decision as a shareholder means that the revaluation policy needs to be followed up immedietly to increase the value for the company.

Key Words :Fixed Assets Audit Procedures; Opinion, PSAK, SPAP.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas berkat kekuatan dan hikmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis telah banyak memperoleh pengajaran, bimbingan, dari dosen program studi dan pihak terkait, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimah kasih kepada :

1. Keluarga yang memberi dukungan semangat dalam menyelesaikan Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan hingga laporan tugas akhir.
2. Prof .Dr.Ir. Agustinus Purna Irawan,I.P.U.,Asean Eng Selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Dr.Dr. Sawiji Widadmojo,S.E.,M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr.Jamaludin Ishak, M.Si.,Akt.,CPI.,CA.,CPA.,Asean CPA. Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Universitas Tarumanagara.
5. Dr.Herlin Tanjung,S.E.,Ak.,M.Si.,CA selaku Sekertaris Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Universitas Tarumanagara.
6. Fery Adang,S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA yang meluangkan waktunya sebagai pembimbing dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf, serta karyawan di Program Studi PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah memberikan waktu mengajar, sharing matakuliah berbagi keahlian dan pengetahuan serta dukungan kelengkapan administrasi hingga menyelesaikan laporan tugas akhir ini.

Selain itu penulis mengharap tugas akhir ini bisa menjadi bahan informasi bagi para pembaca dan kalangan lain.Tak ada gading yang tak retak penulis mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyelesaikn tugas akhir ini.

Jakarta, 29 Oktober 2023

Jantje Lagu

III DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN & GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1 1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2 1. Definisi Serta Ruang Lingkup Standart Audit.....	8
2 2. Deskripsi Aset Tetap.....	8
2.2.1. Pertimbangan Marterialitas.....	9
2.3. Sistem Pengendalian Intern dan Prosedur Audit Terhadap Aset Tetap.....	10
2.3.1. Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap.....	11
2.3.2 Prosedur Audit Aset Tetap.....	12
2.3.3 Prosedur Pengujian Subtantif Aset Tetap.....	13
2.4. Audit Atas Laporan Keuangan.....	16
2.4.1. Penyimpangan Atas Standar Audit dan Opini.....	17
2.4.2. Modifikasi Terhadap Opini Dalam Laporan Auditor Independen.....	17
2.5. Restrukturisasi Perusahaan.....	19
2.5.1. Pengertian dan Bentuk Restrukturisasi.....	19

2.5.2.	Revaluasi Aset tetap.....	20
2.5.3.	Revaluasi Aset Tetap Untuk Tujuan Akuntansi dan Pajak.....	21
2.5.4.	Pengembangan BUMD dan Restrukturisasi.....	22
2.5.5.	Periode Restrukturisasi dan Pemisahan Perusahaan (Split Off).....	22
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	24
	3.1 Metode Penelitian.....	24
	3.2 Gambaran Umum Perusahaan.....	24
	3.3 Struktur Organisasi.....	28
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	29
	4.1. Penilaian Internal Control Atas Aset Tetap.....	29
	4.2. Kinerja Pengelolaan Aset Tetap.....	34
	4.3. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Leuangan.....	36
	4.4. Penerapan Prosedur Audit Tingkat Asersi.....	40
	4.5. Opini Atas Laporan Keuangan Audited Serta Restrukturisasi Perusahaan....	55
BAB V	KESIMPULAN.....	63
	5.1 Kesimpulan dan Saran.....	63
	DAFTAR PUSTAKA.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Historis Perusahaan BUMD.....	25
Tabel 4.1 : Penilaian Internal Control Aset Tetap Perusahaan.....	29
Tabel 4.2 : Nilai Aset tetap Posisi 31 Desember 2022, 3021 dan 2022.....	35
Tabel 4.3 : Daftar Evaluasi Aset Tetap Peninggalan.....	36
Tabel 4.4 : Ringkasam Aset Tetap Peninggalan dan Masalah Kepemilikan.....	47
Tabel 4.5 : Opini Yang Diberikan Akuntan Publik dan Basis Opini.....	56
Tabel 4.6 : Tipe Modifikasi Opini.....	60

DAFTAR LAMPIRAN & GAMBAR

Gambar 3.3 : Gambaran Struktur Organisasi Perusahaan.....	28
Lampiran 1 : Laporan Opini Akuntan Publik.....	69

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan suatu entitas adalah melakukan penilaian atas kewajaran serta kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat perusahaan (*business entity*). Untuk menentukan kewajaran dan kelayakan laporan keuangan yang diaudit, auditor perlu melakukan prosedur audit dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti tentang informasi keuangan dan kriteria yang ditetapkan dan/atau dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Sebaliknya prosedur audit yang dilakukan auditor eksternal kantor akuntan publik (KAP) dalam penugasan (*audit engagement*) sampai dengan pemberian opini dalam laporan auditnya harus sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia, dan hal ini dikarenakan standar audit mengatur tentang tanggung jawab keseluruhan dari auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan. Secara spesifik standar audit juga menetapkan tujuan keseluruhan auditor independen, serta menjelaskan sifat dan ruang lingkup suatu audit yang didesain untuk memungkinkan auditor independent mencapai tujuan audit.

Dalam tahapan audit yang dilakukan auditor atas laporan keuangan suatu entitas, perlu dilakukan penilaian atas efektivitas sistem pengendalian intern suatu entitas yang akan diaudit termasuk menilai kemungkinan resiko salah saji material atas pos-pos laporan keuangan. Aset tetap merupakan suatu akun (*account*) dalam transaksi keuangan perusahaan yang tercermin dalam laporan posisi keuangan (*balance sheet*), dan umumnya memiliki nilai (*value*) yang cukup material dan berpengaruh significant dalam laporan keuangan perusahaan. Suatu nilai aset tetap bila dicatat terlalu besar (*overstated*) akan berpengaruh terhadap laporan keuangan Perusahaan yaitu beban penyusutan menjadi besar dan laba usahanya menjadi kecil sebaliknya aset tetap yang dicatat terlalu kecil (*understated*) akan mengakibatkan beban penyusutannya kecil dan laba usaha akan menjadi besar.

Dalam melakukan audit atas akun aset tetap, auditor eksternal perlu memahami karakteristik serta melihat keberadaan fisik aset tetap dan penguasaan prosedur audit

dalam menentukan kewajaran nilai aset tetap yang tercatat pada laporan posisi keuangan, apalagi kondisi secara fisik dari aset tetap tersebut tersebar di berbagai lokasi termaksud aset-aset tetap milik perusahaan yang secara legal bermasalah. Karakteristik dan kondisi aset tetap yang perlu diketahui meliputi; aset tetap yang dimiliki entitas yang digunakan untuk produksi barang dan/atau jasa, disewakan kepada pihak ketiga atau digunakan dalam menunjang kegiatan administrasi kantor, dan aset tetap juga merupakan unsur yang dikendalikan perusahaan yang dianggap akan menghasilkan manfaat ekonomis selama periode penggunaannya dan umumnya aset tetap digunakan dalam jangka waktu lama.

Pengakuan aset tetap pada saat perolehan dengan cara mengestimasi manfaat ekonomis masa depannya dan dampak penggunaan aset tersebut, disewakan atau digunakan sendiri, dalam prakteknya perusahaan juga dapat memproyeksikan berapa keuntungan dari aset tetap yang digunakan, mempertimbangkan potensi kerugian yang akan terjadi atas penggunaan aktiva tetap.(Ghizari E.I :2006). PSAK Nomor 16 Par 7 menyatakan biaya perolehan aktiva tetap diakui jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan berkernaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal

Penentuan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan suatu entitas mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disajikan dan opini yang akan dikeluarkan akuntan publik.Karena itu berkaitan dengan aset tetap terdapat beberapa kondisi seperti;nilai(value) aset yang tidak material, terdapat harga perolehan aset secara substantif material, tidak terdapat pengaruh material secara keseluruhan dalam penyajian laporan keuangan. Penentuan tingkat materialitas merupakan suatu keputusan penting yang harus dilakukan auditor, dan memerlukan pertimbangan secara professional (Andrianto:2015).

Dalam melakukan prosedur audit terdapat temuan-temuan yang mempengaruhi pendapat akuntan publik karena berhubungan dengan beberapa faktor seperti adanya pembatasan ruang lingkup audit misalkan keadaan yang diciptakan pihak yang diaudit, dokumen tidak lengkap dan/atau tidak memadai, adanya ketidakpastian sehingga pemeriksa tidak dapat menerapkan standar pemeriksaan yang sebenarnya atau terjadinya penyimpangan standar audit dan juga laporan keuangan tidak disajikan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan yang diterapkan secara konsisten. Beberapa hal berikut ini bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan dari standart audit dan pernyataan standart akuntansi keuangan; jika auditor tidak mampu untuk

memperoleh bukti yang cukup untuk menilai apakah terdapat pengaruh yang material atas laporan keuangan, pemeriksa atau auditor dapat memberikan opini yang wajar dengan pengecualian atau tidak memberikan opini atas laporan keuangan; Jikalau pengendalian internal lemah dan catatan-catatan akuntansinya tidak lengkap dan/atau tidak tersedianya dokumen yang cukup dan/atau sistem pengendaliannya tidak menghasilkan data akuntansi yang valid, pemeriksa tidak dapat melakukan prosedur inspeksi sehingga pemeriksa memberikan pendapat WDP karena adanya pengurangan ruang lingkup. Jika sistem pengendalian intern yang ditetapkan tidak sesuai dengan standar akuntansi, dan entitas tidak dapat memperbaiki pengaruh salah saji terhadap laporan keuangannya, maka pemeriksa tidak dapat memberikan opini WTP karena adanya penyimpangan terhadap standart akuntansi (Sorin Dommisoru dan Sorin Vinator (2008).

Suatu sistem pengendalian aset tetap yang memadai akan membantu entitas bisnis dalam menyediakan data yang cukup dan lengkap untuk peningkatan kinerja termaksud mendukung proses pemeriksaan auditor eksternal dan opini atas laporan keuangan hasil audit yang akan bermanfaat bagi top manajemen dan pemilik Perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis dalam mendukung pertumbuhan dan profitabilitas usaha yang berkeberlanjutan (*going concern profit*).

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perseroan Terbatas Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut untuk melakukan restrukturisasi usaha melalui perubahan bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Daerah sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 13 Tahun 2004 dan perubahan ini sejalan dengan tuntutan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

Proses perubahan bentuk badan hukum akan mengakibatkan terjadinya peralihan dan/atau peleburan kedalam badan hukum yang baru dimana seluruh aset dan liabilitas dari entitas usaha sebelumnya akan beralih kedalam entitas usaha yang baru dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam kondisi ini terdapat periode dimana operasi tahun buku entitas sebelumnya perlu diaudit Akuntan Publik dan timbul masa periode peralihan (*kick off*) sebelum penutupan tahun buku entitas lama. Temuan-temuan khususnya secara material berpengaruh significant terhadap laporan keuangan perlu disampaikan Akuntan Publik dalam periode kick off untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh manajemen dan/atau pemilik dalam proses

restrukturisasi sebelum melakukan penutupan buku entitas lama, dan hal ini akan mempengaruhi penilaian (*value*) entitas yang baru baik sisi aset maupun peningkatan ekuitas (*equity*) Perusahaan.

PT Irian Bhakti Papua sebelumnya bernama PD Irian Bhakti yang didirikan Pemerintah Provinsi Irian Jaya melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1986 dan bergerak dibidang distribusi beras pegawai negeri sipil distrik pedalaman sebagai *core businessnya*, dan disamping itu memiliki beberapa unit usaha seperti apotik dan laboratorium, percetakan di beberapa daerah. Secara historis Perusahaan yang diteliti ini merupakan perusahaan peninggalan milik Kerajaan Belanda yang bernama NV NIGIMY didirikan tahun 1959 dengan bidang usaha intinya eksport-import barang dan jasa ke dan dari Negara Belanda serta Negara-Negara Eropa lainnya dan untuk barang yang diimport disalurkan ke beberapa toko di wilayah New Guinea yang berubah menjadi Irian Barat saat itu. Sebagai entitas bisnis yang besar telah memberikan pengaruh ekonomi kepada daerah karena dukungan infrastruktur aset tetapnya yang begitu banyak meliputi bangunan berupa gudang-gudang, kantor pusat utama dan bangunan kantor-kantor cabang serta rumah-rumah tinggal yang dihuni eks direksi hingga perumahan karyawan yang berlokasi diseluruh wilayah kota dan kabupaten yang berada di Tanah Papua seperti Jayapura, Kabupaten Biak, Kabupaten Serui, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Waisai Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Timika, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Wamena.

Infrastruktur aset tetap sebagaimana disebutkan diatas sangat mendukung kegiatan distribusi beras karena hampir 80 % omset bruto usaha diperoleh melalui jasa distribusi beras PNS distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Papua Barat. Sebagian dari bangunan berupa gedung kantor dan gudang dikuasai dan/atau digunakan perusahaan sedangkan lainnya dikuasai pihak tertentu dalam hal ini masyarakat adat setempat termaksud gedung kantor pusat dan dua buah gudang ukuran besar di jalan utama kota Jayapura yang permasalahannya sedang dalam proses upaya hukum baik perdata maupun pidana pada Pengadilan Negeri Jayapura. Untuk aset tetap berupa bangunan rumah yang berada di seluruh kota dan kabupaten di Tanah Papua sebagian besar masih dikuasai dan dihuni secara turun-temurun oleh bekas karyawan dan anak-anak serta keluarganya.

Disaat perubahan manajemen pada awal tahun 2021, direksi melakukan langkah-langka restrukturisasi dengan menunjuk salah satu kantor akuntan publik untuk

melakukan audit laporan keuangan perusahaan tahun buku 2020 dan audit untuk tahun buku 2022. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk badan hukum menjadi perusahaan persero, maka terjadilah penambahan komposisi komisaris PT Irian Bhakti Papua berdasarkan Akta Notaris M. Syahrul Khair, S.H., M.Kn Nomor 26 Tanggal 20 February 2023. Memasuki tahun 2022 terjadi masa *split off* yang harus dilalui Perusahaan sehingga temuan-temuan masalah bawaan hasil audit laporan keuangan tahun buku sebelumnya 2021 perlu ditindaklanjuti penyelesaiannya termasuk masalah aset tetap khususnya aset peninggalan berupa tanah dan bangunan yang sebagian besar memiliki resiko bawaan yang cukup tinggi baik secara fisik ataupun pencatatan nilainya dan aset-aset tetap tersebut sebagian besar berada di berbagai kota dan kabupaten diseluruh Tanah Papua dimana kantor cabang Perusahaan berada.

Temuan atas permasalahan aset tetap khususnya aset peninggalan berupa tanah dan bangunan selama beberapa tahun sebelumnya merupakan hal mendasar yang memiliki efek kumulatif dan signifikan dalam laporan audit Akuntan Publik dengan memberikan pendapat "Wajar dengan Pengecualian (WDP)" dan opini Tidak Memberikan Pendapat. Kondisi tersebut antara lain disebabkan beberapa kelemahan bawahan *internal control* atas aset tetap yang cukup signifikan diantaranya; secara administratif sebagian aset-aset tetap yang tercantum dalam daftar aset tidak didukung oleh dokumen kepemilikan yang cukup, dan terdapat aset bangunan rumah masih dikuasai pihak ketiga dan adat, termasuk *ex karyawan* dan karyawan, ada aset bangunan rumah dimana penghuninya telah memiliki Surat Keputusan Gubernur Papua -DUM tentang penghapusan dan/atau penjualan rumah golongan III milik Pemerintah Provinsi Papua, dan secara akuntansi aset tersebut tercatat sebesar nilai perolehan aset dan nilai bukunya telah bersaldo nol namun masih disajikan dalam laporan posisi keuangan hasil audit tahun buku 2022, dan belum dilakukannya kebijakan revaluasi sesuai PSAK Nomor 16 yang berdampak pada nilai (*value for the company*). Manajemen telah melakukan *upgrade* terhadap pelaksanaan sistem akuntansi komputerisasi dalam tahun 2022 untuk kantor cabang dan kantor pusat guna mempercepat pelaporan konsolidasi.

Dalam periode peralihan di tahun 2022, pembukuan Perusahaan PD Irian Bhakti harus ditutup karena proses tender distribusi beras PNS distrik Pedalaman Papua dan Papua Barat harus dilakukan secara *online* dengan menggunakan dokumen administrasi badan hukum baru yaitu PT Irian Bhakti Papua. Karena itu persiapan

administrasi mengikuti proses tender distribusi beras dibulan-bulan akhir menjelang tutup tahun 2022 untuk kegiatan di tahun anggaran 2023 dinilai sangat penting karena bisa terjadi situasi yang mengandung ketidakpastian material terkait kelangsungan usaha apabila entitas gagal memenangkan tender pekerjaan distribusi beras, Audit terhadap laporan keuangan untuk penutupan buku entitas lama PD Irian Bhakti yang dilakukan Akuntan Publik dan telah mengeluarkan laporan auditnya per 30 september 2022 dengan “Wajar Tanpa Modifikasi” dan didalam tiga bulan terakhir operasi perusahaan yang berakhir 31 desember 2022 mulai menggunakan nama entitas PT Irian Bhakti Papua sedangkan administrasi Perusahaan dalam proses tender secara online menggunakan nama PD Irian Bhakti. Fakta yang terjadi dari hasil tender online memperlihatkan perusahaan gagal memenangkan tender pelaksana distribusi beras pegawai negeri sipil distrik pedalaman Papua dan Papua Barat untuk kegiatan di tahun anggaran 2023 dengan sumber dananya dari APBN yang dilakukan LPSE Kementerian Keuangan RI sehingga secara material telah mempengaruhi keberlangsungan usaha entitas. Kelengkapan dokumen administrasi tender sesuai persyaratan yang diinput *online* serta kelancaran jaringan dan time schedule dalam proses administrasinya sangat menentukan kelolosan tender secara nasional.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan aset tetap khusus aset peninggalan berupa tanah dan bangunan milik entitas sebagaimana disampaikan diatas, untuk itu penulis bermaksud menulis laporan tugas akhir berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis sebagai tenaga ahli akuntan manajemen atas permasalahan tersebut dalam membantu pemilik dan/atau top manajemen sebagai basis data untuk pengambilan keputusan strategis dalam meningkatkan nilai (*value*) Perusahaan khususnya mendukung restrukturisasi perubahan bentuk badan usaha menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Daerah. Judul penulisan tugas akhir ini yaitu “Analisis Prosedur Audit Aset Tetap dan Opini Laporan Keuangan Audited Serta Dampak Pada Restrukturisasi Perusahaan. Alasan penulis memilih judul tersebut disebabkan adanya permasalahan kumulatif internal control dan/atau kepemilikan atas aset tetap dan konsistensi penerapan prosedur audit serta opini Akuntan Publik sesuai SPAP maupun penerapan PSAK terkait yang secara material belum memadai dan berpengaruh signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan audited termaksud opini audit serta dampak restrukturisasi bagi Perusahaan.

1.2. Tujuan

Tujuan penulisan karya akhir ini adalah :

1. Menganalisis terhadap prosedur audit aset tetap serta opini laporan keuangan audited oleh auditor eksternal dari tahun 2020 sampai dengan 31 desember 2022 dan dampak pada restrukturisasi Perusahaan PT Irian Bhakti Papua
2. Sebagai syarat penyusunan Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Profesi Akuntan(PPA) Unuiversitas Tarumanagara Jakarta.

1.3. Batasan /Ruang Lingkup

Perusahaan yang menjadi objek analisis adalah PD Irian Bhakti yang telah berubah bentuk badan hukumnya menjadi PT Irian Bhakti Papua tahun 2023. Acuan yang digunakan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK)dan standar Profesionalisme Akuntan Publik(Revisi 2021). Lingkup pembahasannya meliputi analisis prosedur audit aset tetap dan opini yang diberikan pada laporan keuangan audited serta dampak pada restrukturisasi Perusahaan.

REFERENSI

- Presiden Republik Indonesia(2007) , Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Kementerian Dalam Negeri RI (2004) ,Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 13 Tahun 2004.
- Presiden Republik Indonesia (2003) ,Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Presiden Republik Indonesia(2017), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah(BUMD).
- Menteri Keuangan Republik Indonesia (2016),Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 29/PMK.03/2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Revaluasi Aset tetap.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (2021), *Standar Profesional Akuntan Publik* (Revisi 2021).
- Ikatan Akuntan Indonesia(IAI), *Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia* (2015).
- Pemerintah Provinsi Papua, *Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2022* Tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha PD Irian Bhakti Menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Daerah.
- Pemerintah Provinsi Papua, *Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor Tahun 2021* Tentang Pergantian Direksi PD Irian Bhakti.
- Soekrisno Agoes , *Praktika Audit*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta (2012).
- M, Mohamad SE.,MSi.,Ak.,CA.,CPA.,CFRa.,Phd(cand), *Panduan Praktikum Audit Kontemporer*, Penerbit Scopindo Media Pustaka (2020).
- Andrianto,N (2015),*The Development of Performance Audit Capacity, A Comparison Study in The BPK and ANAO(online)*. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Diakses tanggal 16 agustus 2023.
- Ghizari E. I, (2006)”pp 394,395”*Auditul situațiilor financiare în entitățile economice*”,Bucharest,Official Magazine(online), Diakses tanggal 16 Agustus 2023.
- Domnisoru I Sorin,Sorin Vinator(2008),*The Financial Audit Complexity of The Fixed Assets European Research Studies,Volume XI,Issue (4)*(online),Diakses tanggal 16 Agustus 2023.

COSO Internal Control Framework (2023), *The University of California has adopted the internal control framework promulgated by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*, (online), improving-accessibility@berkeley.edu .Diakses tanggal 1 oktober 2023.

Mahsun Moh,SE.,MSi.,Ak.,CA.,CPA.,CFRa.,Phd(Cand) "et al" dalam bukunya Panduan Praktikum Audit Kontemporer, Scopindo Media Pustaka (2020):

IshakJamaludin,Dr.,MSi.,Ak.,CA.,CPA.,CPI.,AseanCPA(2003),Universitas

Tarumanagara Jakarta, materi kuliah PPAK Universitas Tarumanagara

Angkatan 32.

[https:// investaadvisor.Com](https://investaadvisor.com)(online),Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Perusahaan, Diakses tanggal 1 Oktober 2023.